

DAFTAR PUSTAKA

- Adithia Anbar Prakasa. *Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo*. "Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin". 2013. (1) : 23)
- Ahmad Mukri Aji. 2016. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar I FSH UIN Syarifhidayatullah*. "Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik dan Hukum ; Analisis Kasus Prosesi Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri", 3(1): 42).
- Ahmad Yani. 2018. "Sistem Pemerintahan Indonesia Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang – Undang Dasar 1945". 15(2):57).
- Amalia Herin Novita. 2014. "Jurnal Eksistensi Calon Independen Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (Studi Kasus Pasangan Dwi-Uddin)" , 1(1): 5).
- Asep Achmad Muhlisian. 2013. "Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang Yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2 Universitas Pendidikan Indonesia", *Tesis* tidak untuk diterbitkan. Bandung: Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Hlm 32.
- Charles F. Andrian. 1992. *Kehidupan Politik Dan Pembahasan Sosial*. Tiara Wacana. Yogyakarta. Hlm.19
- Cutlip, Center, Broom. 2009. *Effective Public Relations*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Detik.com. 2017. *Menengok Pemakzulan Aceng Fikri yang Jadi Rujukan DPRD Katingan*. (Online), (<https://m.detik.com/news/berita/d-3392223/menengok-pemakzulan-aceng-fikri-yang-jadi-rujukan-dprd-katingan>). Diakses pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 09.54.
- Djam'an Satori. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung. Hlm 103.
- Fitang Budhi Adithia. 2020. *IDN TIMES. Sejarah Dan Kisah Sukses Calon Independen di Pilkada Indonesia*. (Online). (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sejarah-dan-kisah-sukses-calon-independen-di-pilkada-indonesia/3>). Diakses pada tanggal 13 November 2020 pukul 12.12 wib.
- Fitra Arsil. 2017. *Stabilitas Sistem Presidensial Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak dan Presidential Threshold*. (Online), Vol.5, Hlm. 211. (https://staff.ui.ac.id/system/files/users/fitra.arsil/publication/stabilitas_sistem_presidensial_indonesia_melalui_pemilu_serentak_dan_presidential_threshold-fitra.pdf), diakses pada tanggal 8 Oktober 2020 pukul 20.35.
- Hafied Cangara. 2016. *Komunikasi Politik Konsep, teori dan Strategi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Haluan.com. 2020. *Gandeng Tokoh Adat Ramlan Nurmatias Kembali Ikut Pilwako Bukittinggi 2020*. (Online),

(<https://www.harianhaluan.com/news/detail/99855/gandeng-tokoh-adat-ramlan-nurmatias-kembali-ikut-pilwako-bukittinggi-2020>). Diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 13.25.

Hariwijaya.2010. *Strategi Lobi dan Negosiasi Bisnis, Politik, dan Pengembangan SDM*. Jakarta:Oryza.

Hendra Kurnia Pulungan. 2010. “Jurnal Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara”. Hlm. 2.

Hendriawan. 2017. “Komunikasi Politik Petahana (Studi Kampanye Pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017”. *Skripsi* tidak untuk diterbitkan . Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.. Hlm. 116-118.

Histori.id. 2019. *Sejarah Bukittinggi : Kota Jam Gadang*. (Online), (<https://histori.id/sejarah-bukittinggi-kota-jam-gadang/>)” diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 11.20

RPIJMKotaBukittinggi 2017. *Profil Kota Bukittinggi*. (Online). (Sippa.ciptakarya.pu.go.id/_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/.DOCRPIJM_1502707442BAB_II_PROFIL_KOTA_BUKIT_TINGGI.pdf), diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 12.55.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2.

Husaini Usman.1995. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta , Hlm. 47

IDNTIMES. 2019. *Gubernur Bisa Dimakzulkan Lewat DPRD, Ini Lika-likunya*. (Online), (<https://www.google.co.id/amp/s/sulsel.idntimes.com/news/sulsel/amp/aanpranata/gubernur-bisa-dimakzulkan-lewat-dprd-ini-lika-likunya>). Diakses pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 09.27.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan*, (Online), (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/12tahun2008uu.htm>), Diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 08.00.

Lexy J. Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya,. Hlm. 6.

Liputan6.com. 2002. *Gubernur Kalsel Dipecat, Mendagri Membentuk Tim Independen*. (Online), (<https://m.liputan6.com/news/read/40319/gubernur/kalsel-dipecat-mendagri-membentuk-tim-independen>). Diakses pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 09.16.

- Mahi M.Hikmat Komunikasi Politik. Simbiosis Rekatama Media. Bandung. 2011. Hlm. 185.
- Miriam Budiardjo.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 109, 408.
- Mulyana. 2007. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta:Ircisod. Hlm.29.
- Ni Putu Eka Martini. 2018. “ Problematika Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Hlm.1.
- Onong Uchjana. 1984. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 17
- Ratna Setyarahajoe.2016. “Bentuk Komunikasi Politik Untuk Membangun Perilaku Politik Masyarakat Lokal Guna Menciptakan Pemilukada Yang Aman”. Hlm 38-39.
- Rusadi Kantaprawira. 1977. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Sinar Baru Algesindo.
- Saartje Sarah Alfons. 2019. “Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Universitas Pattimura. Ambon.” Hlm. 3-4.
- Sunarto. 2016. “Prinsip Checks And Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. 45(2): 158).
- Unika, Suryanto, Wiwin. 2018. “Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi”. 26(2): 129.
- Yakob.2016.” Konflik Antara Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Kasus Pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.*Tesis* tidak untuk diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonsia Library.
- Yulman. 2017. Sebelas Prestasi Nasional Kado Intimewa Di HJK Bukittinggi Ke 233, *Berita Kota Bukittinggi*, (Online), (www.bukittinggi.go.id, diakses pada tanggal 15 September 2019 pada pukul 09.12.
- Zulkarnain Ridlwan. 2016. “Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Jurnal Konstitusi” . 12: 312.